

# Penyaluran Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 Melalui Perbankan Syariah

Ianatus Saidah<sup>1</sup>, Nur Rohmah<sup>2</sup>, Azka Laila Azkia<sup>3</sup>, Muhammad Iqbal<sup>4</sup>, Asri Andriyani<sup>5</sup>, Wahidullah<sup>6</sup>  
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara<sup>123456</sup>

[lansaidah08@gmail.com](mailto:lansaidah08@gmail.com)<sup>1</sup>, [rohmah0802@gmail.com](mailto:rohmah0802@gmail.com)<sup>2</sup>, [azkalaila47@gmail.com](mailto:azkalaila47@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ntmuhammadiqbal@gmail.com](mailto:ntmuhammadiqbal@gmail.com)<sup>4</sup>, [asriandriyani69@gmail.com](mailto:asriandriyani69@gmail.com)<sup>5</sup>, [wahidullahunisnu@gmail.com](mailto:wahidullahunisnu@gmail.com)<sup>6</sup>

\*Corresponding Author

## Histori Naskah:

Submit: 18-06-2025

Accepted: 18-07-2025

Published: 30-07-2025



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

## Abstrak:

Penelitian ini mengkaji secara mendalam potensi dan tantangan dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025 kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan melalui perbankan syariah. Program BSU merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk menjaga kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan penyaluran bantuan kepada penerima yang memenuhi syarat, serta kecepatan dalam distribusinya. Penelitian ini menyoroti peran penting perbankan syariah sebagai mitra potensial dalam proses distribusi BSU. Perbankan syariah dinilai memiliki keunggulan dalam hal prinsip keuangan yang etis dan inklusif, serta infrastruktur digital yang berkembang pesat. Kajian difokuskan pada tiga aspek utama: kesiapan teknologi yang dimiliki bank syariah dalam mendukung penyaluran dana secara efisien, kesesuaian regulasi yang mengatur kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah, serta tingkat literasi dan pemahaman peserta BPJS terhadap layanan perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari berbagai sumber terpercaya, seperti laporan lembaga pemerintah, artikel ilmiah, dan pendapat para pakar ekonomi syariah. Penelitian ini juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari program BSU melalui bank syariah, termasuk kontribusinya terhadap peningkatan inklusi keuangan dan kepercayaan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Bantuan Subsidi Upah, BPJS Ketenagakerjaan, Perbankan Syariah.

---

## Pendahuluan

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi tenaga kerja merupakan salah satu program penting yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap tantangan ekonomi, terutama dalam situasi krisis. Program ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan pekerja dengan memberikan bantuan tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. BSU dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya di kalangan pekerja yang terdampak oleh gejolak ekonomi, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.

---

Salah satu syarat utama untuk mendapatkan bantuan ini adalah menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan, yang menunjukkan bahwa BSU sangat bergantung pada sistem yang telah dibangun oleh lembaga tersebut. BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai pengelola data utama tenaga kerja yang berhak menerima BSU. Dengan basis data yang sangat luas, BPJS memiliki kapasitas untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Sebagai penyedia perlindungan sosial bagi tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga berfungsi sebagai jembatan antara pekerja dan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial, termasuk BSU. Oleh karena itu, efisiensi dalam pemanfaatan sistem data dan saluran distribusi BPJS Ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat krusial untuk keberhasilan penyaluran bantuan ini.

Bank syariah memiliki potensi besar untuk terlibat dalam penyaluran BSU, mengingat karakteristiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang adil dan transparan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip keuangan yang berbasis pada musyarakah, mudharabah, dan prinsip bagi hasil lainnya, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Pemanfaatan bank syariah dalam penyaluran BSU dapat membawa manfaat tambahan, seperti mengurangi biaya administrasi dan memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat yang lebih luas. Namun, pemanfaatan ini belum optimal, dan masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mengintegrasikan bank syariah dalam proses penyaluran BSU.

Penelitian ini akan fokus pada masalah utama, yaitu keterbatasan pemanfaatan bank syariah dalam penyaluran BSU. Meskipun bank syariah memiliki potensi yang besar, saat ini masih banyak kendala yang menghalangi optimalisasi peran mereka, termasuk infrastruktur yang belum memadai, ketidaktahuan masyarakat tentang layanan bank syariah, dan keterbatasan sistem yang dapat mendukung penyaluran dana secara efisien. Selain itu, faktor regulasi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan bank syariah, juga menjadi salah satu hambatan utama dalam memperluas peran bank syariah dalam program ini.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sekarang karena Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, di mana banyak pekerja yang membutuhkan dukungan finansial yang cepat dan efisien. Dengan meningkatnya peran bank syariah dalam sistem keuangan nasional, sudah saatnya untuk mengeksplorasi potensi mereka dalam mendukung program-program sosial yang ada, termasuk BSU. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengoptimalkan penyaluran BSU. Selain itu, temuan ini juga dapat memberi wawasan baru dalam mengembangkan sistem distribusi bantuan sosial yang lebih inklusif.

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai peran bank syariah dalam sektor keuangan sosial di Indonesia, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengintegrasikan bank syariah dalam proses penyaluran BSU, yang pada gilirannya dapat mempercepat distribusi bantuan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Dalam beberapa tahun yang lalu, sektor keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Peran perbankan syariah semakin terlihat dalam mendukung berbagai program ekonomi nasional, termasuk dalam penyaluran dana publik. Dengan jumlah nasabah yang terus bertambah dan dedikasi terhadap prinsip keadilan serta keberkahan, perbankan syariah menjadi pilihan menarik sebagai mitra untuk penyaluran BSU. Namun, untuk mengintegrasikan program BSU dengan layanan perbankan syariah, diperlukan penelitian yang lebih mendalam.

---

Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain mengenai kesiapan infrastruktur teknologi perbankan syariah, keselarasan regulasi, serta pandangan dan pemahaman peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki potensi dan tantangan dalam penyaluran BSU bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2025 melalui layanan perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan guna meningkatkan program BSU di masa yang akan datang.

BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, serta warga negara asing yang bekerja di Indonesia minimal selama enam bulan. Jenis perlindungan yang diberikan meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP).

Penyaluran program Bantuan Subsidi Upah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan ditujukan untuk meringankan beban peserta dalam hal keuangan dan memenuhi kebutuhan pangan. Sasaran program ini adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang terdaftar aktif dalam sistem jaminan sosial yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Pelaksanaan program bantuan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan dukungan pemerintah berupa BSU yang membantu memenuhi kebutuhan pokok, bantuan ini memberikan dampak positif bagi penerimanya. Untuk dapat mengikuti program Bantuan Subsidi Upah, karyawan harus terdaftar dan aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka diakui sebagai peserta aktif. (Triana, 2021)

## **Studi Literatur**

### **Bantuan Subsidi upah**

Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah suatu bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja berpenghasilan rendah, dengan tujuan utama untuk melindungi daya beli mereka dan membantu mereka bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, terutama yang dipicu oleh pandemi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sulastri dan Kholis Nur (2022), BSU berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan pekerja dalam menghadapi dampak dari penurunan ekonomi, serta mengurangi beban biaya hidup yang meningkat. Selain itu, program ini berperan dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi dengan memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Secara lebih luas, bantuan tunai langsung seperti BSU merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi negara (Muga Maria Prudensiana Leda et al., 2021). Bantuan ini juga menjadi bagian dari program jaminan sosial yang mencakup subsidi untuk gaji pekerja, yang disalurkan dengan ketepatan waktu dan sasaran, guna memastikan bahwa bantuan ini diterima oleh mereka yang membutuhkan.

### **Indikator Keberhasilan BSU**

Keberhasilan program BSU dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain ketepatan waktu penyaluran, ketepatan sasaran, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Penyaluran BSU harus dilakukan secara tepat waktu agar dapat segera membantu pekerja yang terdampak. Selain itu, ketepatan sasaran menjadi faktor penting, karena bantuan ini hanya boleh diterima oleh pekerja yang memenuhi kriteria tertentu, seperti penghasilan di bawah batas yang ditetapkan dan bukan merupakan bagian dari ASN, TNI, atau Polri. Dampak yang diharapkan dari pemberian bantuan ini adalah peningkatan daya beli masyarakat dan kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi yang lebih luas (Syafuruddin et al., 2021).

---

---

### **Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Penyaluran BSU**

BPJS Ketenagakerjaan memegang peran penting dalam penyaluran BSU. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi data peserta yang memenuhi syarat. Data yang akurat dan tepat sangat menentukan kelancaran distribusi bantuan. Dengan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa program BSU dapat disalurkan tepat sasaran dan efisien. Proses verifikasi data peserta ini akan menghindari potensi kesalahan dalam penyaluran dan memastikan bahwa hanya pekerja yang benar-benar membutuhkan yang akan menerima bantuan.

### **Perbankan Syariah dan Potensinya dalam Penyaluran BSU**

Perbankan syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, memiliki potensi besar untuk berperan dalam penyaluran BSU. Dalam sistem perbankan syariah, pembagian hasil dan risiko antara penyedia dana (investor) dan pengguna dana (pengusaha) menjadi dasar prinsip operasional. Bank syariah juga menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar, serta berkomitmen pada transparansi dan keadilan (Susilo Jahja & Iqbal, n.d.). Potensi perbankan syariah dalam penyaluran BSU sangat relevan karena sistem yang adil dan berbasis pada prinsip moral yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini, terutama bagi penerima yang lebih memilih untuk menggunakan layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Dengan semakin berkembangnya jaringan bank syariah di Indonesia dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, bank-bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) bisa menjadi mitra strategis dalam penyaluran BSU. Keunggulan lainnya adalah perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum memiliki akses ke layanan perbankan konvensional, melalui produk keuangan inklusif yang lebih terjangkau.

### **Analisis dan Sintesis: BSU dan Perbankan Syariah**

Jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki sejumlah keunggulan dalam penyaluran BSU. Salah satu keunggulannya adalah prinsip keadilan dalam distribusi hasil dan risiko, yang mengarah pada penyaluran dana yang lebih transparan dan tidak mengandung unsur bunga. Sistem ini dapat memperkuat rasa kepercayaan masyarakat, terutama bagi mereka yang menghindari produk keuangan yang berbasis bunga (riba). Selain itu, prinsip syariah yang menekankan pada kesejahteraan sosial dapat mempercepat penerimaan program BSU di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah yang mayoritas beragama Islam.

Namun demikian, meskipun memiliki potensi besar, perbankan syariah juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan mekanisme penyaluran BSU. Tantangan tersebut antara lain adalah terbatasnya infrastruktur dan jaringan cabang, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk perbankan syariah. Untuk itu, pengembangan layanan digital dan peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kunci untuk memaksimalkan peran bank syariah dalam penyaluran BSU.

### **Fokus pada Konteks Penyaluran BSU melalui Bank Syariah**

Dalam konteks penyaluran BSU, bank syariah dapat menawarkan sejumlah mekanisme yang lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam, seperti akad wadi'ah atau mudharabah untuk penyaluran dana. Mekanisme ini dapat memberikan rasa aman dan adil bagi penerima bantuan. Penyaluran dana melalui bank syariah juga berpotensi mengurangi biaya operasional karena proses yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan sistem digital yang ada. Selain itu, bank syariah dapat mempercepat distribusi bantuan ke masyarakat dengan memanfaatkan teknologi seperti mobile banking, yang dapat diakses dengan mudah oleh penerima BSU di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh bank konvensional. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan peran bank syariah dalam penyaluran BSU. Salah satunya adalah pentingnya kolaborasi antara bank syariah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah dalam memastikan sistem verifikasi dan distribusi yang efisien. Juga, perlu adanya peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi untuk mendukung distribusi bantuan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

---

---

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang dipilih karena topik yang diteliti masih relatif baru dan membutuhkan eksplorasi teoritis yang mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan dinamika terkait dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Mengingat keterbatasan penelitian empiris di bidang ini, studi literatur menjadi pendekatan yang tepat untuk memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif, mengidentifikasi tren terkini, dan mengungkap wawasan yang dapat menjelaskan fenomena yang ada. Proses Pengumpulan Data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi dari instansi yang terpercaya, yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024. Pemilihan sumber data didasarkan pada kriteria relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penerbit, dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang penyaluran BSU dan peran bank syariah. Seluruh sumber yang dikumpulkan akan dievaluasi secara kritis untuk memastikan validitas dan ketepatannya dalam mendukung tujuan penelitian ini.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber pustaka yang dikumpulkan. Setiap tema yang ditemukan akan dianalisis untuk mengungkap hubungan antara konsep-konsep utama, seperti peran perbankan syariah dalam penyaluran BSU, tantangan yang dihadapi, dan kemungkinan solusi yang diusulkan dalam literatur yang ada. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya akan menyusun informasi secara deskriptif, tetapi juga memberikan sintesis yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dengan struktur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis yang lebih kuat mengenai potensi bank syariah dalam mendukung program BSU dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan distribusi bantuan sosial di Indonesia.

## Hasil

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja serta memberikan bantuan kepada pekerja atau buruh dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Program ini memberikan bantuan sebesar Rp 600.000 yang disalurkan untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025. Untuk menjadi penerima BSU, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: penerima merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 April 2025, menerima gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, dan tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI, atau POLRI.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan program ini, terutama dalam memverifikasi data pekerja agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, BPJS bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk memastikan dana tersalurkan dengan cepat dan sesuai aturan. Dalam hal penyaluran, perbankan syariah memiliki potensi besar, khususnya di wilayah mayoritas Muslim seperti Aceh, karena telah memiliki infrastruktur dan teknologi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan bank syariah meliputi pertumbuhan basis nasabah, jaringan luas, teknologi digital yang mendukung transaksi cepat dan aman, serta kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah.

Mekanisme penyaluran BSU melalui bank syariah dimulai dari proses pendaftaran dan verifikasi data oleh BPJS, kemudian pembukaan rekening secara kolektif bagi penerima yang belum memiliki rekening bank syariah. Setelah itu, dana BSU akan ditransfer langsung ke rekening penerima melalui bank Himbara atau bank syariah yang ditunjuk. Bank syariah juga akan menyediakan layanan edukasi dan akses digital untuk memudahkan penerima dalam mengakses dana bantuan. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan, seperti regulasi yang belum sepenuhnya mendukung keterlibatan bank syariah, minimnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur di daerah tertentu, serta perlunya integrasi sistem antara BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan perbankan syariah.

---

---

Penyaluran BSU melalui bank syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan inklusi keuangan syariah, kemudahan akses dana melalui layanan digital, peningkatan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah, serta pengawasan dan transparansi yang lebih baik dalam penyaluran dana. Untuk mendukung keberhasilan program ini, bank syariah perlu membangun kepercayaan publik dengan meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, memperkuat edukasi mengenai manfaat perbankan syariah, serta menjalin kolaborasi yang erat dengan pemerintah dan regulator terkait.

### **Pembahasan**

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dirancang untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam menghadapi kesulitan ekonomi pasca-pandemi merupakan langkah penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan memainkan peran utama dalam memastikan bahwa data penerima bantuan akurat dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akurasi data ini sangat penting untuk menjamin bahwa bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan efektif (www.bpjsketenagakerjaan, 2022).

Salah satu aspek penting dalam penyaluran BSU adalah kemitraan dengan perbankan syariah. Bank syariah tidak hanya beroperasi berdasarkan prinsip keuangan Islam yang bebas dari riba, tetapi juga memiliki potensi besar dalam hal efisiensi penyaluran dana dan kepercayaan masyarakat. Menurut Harahap (2021), pakar ekonomi Islam, perbankan syariah mampu memberikan layanan keuangan yang tidak hanya bersifat profit-oriented, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan sosial dan inklusi keuangan yang lebih luas.

Selain prinsipnya yang etis dan sesuai syariah, perbankan syariah saat ini telah memiliki infrastruktur digital yang memadai serta jaringan pelayanan yang luas, yang memungkinkan proses penyaluran dana berjalan dengan cepat dan efisien. Hal ini diperkuat oleh pandangan Beik (2023) ekonom syariah dari IPB University, yang menyatakan bahwa digitalisasi perbankan syariah merupakan kunci dalam mendukung distribusi bantuan sosial secara lebih transparan dan terukur, khususnya di tengah kondisi krisis.

Namun, potensi besar ini juga diiringi oleh sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya konsisten serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut laporan dari (www.OJK, 2022), masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa layanan bank syariah sama seperti bank konvensional, hanya berbeda nama. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam perluasan literasi dan adopsi keuangan syariah.

Selain itu, aksesibilitas perbankan syariah di daerah terpencil juga masih perlu ditingkatkan. Banyak wilayah di Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan keuangan syariah karena keterbatasan infrastruktur atau sumber daya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Muhhlisin (2022), seorang akademisi keuangan syariah, yang menyatakan bahwa perlu adanya strategi integratif yang melibatkan lembaga keuangan mikro syariah dan teknologi berbasis digital untuk menjangkau masyarakat akar rumput.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, bank syariah perlu memperkuat kolaborasi dengan regulator seperti OJK dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses edukasi keuangan. Program-program literasi keuangan syariah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat menggunakan layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari (www.Bank Indonesia 2023), yang menyatakan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah harus menjadi prioritas nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan mekanisme penyaluran bantuan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi, diharapkan Program BSU dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, seperti peningkatan inklusi keuangan syariah, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, serta penjaminan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang memang membutuhkan.

## Kesimpulan

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 melalui perbankan syariah merupakan upaya strategis pemerintah dalam membantu sekitar 17,3 juta pekerja berpenghasilan rendah, termasuk guru honorer, yang terdampak kondisi ekonomi sulit. Bantuan sebesar Rp 600.000 diberikan untuk periode Juni dan Juli 2025 dan disalurkan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra resmi. Program ini ditujukan bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan, serta bukan ASN, TNI, atau Polri. Verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan memastikan penyaluran tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Penggunaan bank syariah membuka alternatif layanan berbasis prinsip syariah bagi penerima, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan literasi perbankan syariah di kalangan pekerja. Sinergi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga keuangan syariah ini memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan pekerja secara aman dan efisien. Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya mencakup evaluasi efektivitas penyaluran BSU melalui bank syariah dalam aspek kecepatan, ketepatan sasaran, dan kontribusi terhadap inklusi keuangan syariah; perbandingan dengan sistem penyaluran bank konvensional terkait akses, biaya, dan kepercayaan masyarakat; analisis dampak jangka panjang terhadap daya beli pekerja dan ekonomi lokal; strategi peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pekerja; serta pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk pengembangan sistem teknologi yang terintegrasi guna memperlancar distribusi bantuan secara efisien dan akurat.

## Referensi

- Adekantari, S., & Rukmana, L. (2024). Peran Bank BSI Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 95–115.
- Afriansyah S, & Rema K. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pemberianbantuan Subsidi Upah (Bsu) Kepada Pekerja Swasta Yangbergaji Dibawah 5 Juta. *Muamalah*, 7, 1–17.
- Amri, L. A., & Amri, W. A (2021). Ekplorasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tenaga Kependidikan Non PNS Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(1), 181–188. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i1.297>
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 75–87.
- Frandika S, et al. (2024). Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur Tentang Strategi dan Tantangan. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 1(3), 163–177. <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.215>
- Ilmiah D., & Wonoseto, M. G. (2021). Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Layanan BPJS Pada Perbankan Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.29300/aj.v7i1.3707>
- Listya R. & Pasaribu, A. R. (2024). Layanan dan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 2(1), 44–62. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.38>
- Mei N., & Amalia, H. (2024). Peran PT . Bank Syariah Indonesia Tbk Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Membantu UMKM di Indonesia. *I(2)*, 36–42.
- Mukhlisin, M. (2022). Strategi Penguatan Keuangan Syariah di Daerah Terpencil: Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Teknologi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 123–134. <https://doi.org/10.15408/jeqs.v6i2>
- Mustofa Y.I & Akbar, E. E. (2022). Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariahdi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Sulastrri, & Kholis N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat. In *Jurnal Penelitian Ipteks* (Vol. 7, Issue 1).

- Susilo A., et al. (2022) Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional.
- Syauqi I. (2023). Digitalisasi Perbankan Syariah dalam Penyaluran Bantuan Sosial: Studi Kasus Program BSU. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jkps.v5i1>
- Syafruddin, S., & Kalrah, A. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 104–110. <https://doi.org/10.55678/jia.v9i2.477>
- Syahputra, I., et al (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
- Triana A.M. (2021). Efektivitas Penyaluran Progam Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo .Skripsi\_Ethesis Amin Nur Triana.
- Vintana A. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pembiayaan Umkm Di Parepare Oleh. *Ayan*, 15(1), 37–48.